

# PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG DEMOKRASI PLURALISTIK DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA

**Wirdatul Jannah**

Email: [wirdatulj7@gmail.com](mailto:wirdatulj7@gmail.com)

**Pembimbing:** Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*This study aims to find out the thoughts of Abdurrahman Wahid about pluralistic democracy and its influence in Indonesia. Pluralistic democracy is a theory initiated by Robert A. Dahl. Therefore, the formulation of the problem in this research is what Abdurrahman Wahid's thinking about pluralistic democracy and its influence in Indonesia. This research uses qualitative research approach with descriptive research type with data collection is done by method of research library.*

*From the results of the research shows that Abdurrahman Wahid is an Indonesian intellectual figure who expressly accepted democracy as a final preference for a political or state system especially in Indonesia which has a diversity of ethnic groups. Abdurrahman Wahid stated that democracy must be accompanied by the recognition of plurality, social justice, economically, politically, and legally so that the unity of Indonesia remains intact within the Unitary State of the Republic of Indonesia. Democratic values such as social justice, freedom, recognition of individual rights, and social norms and local wisdom of the Indonesian nation must be fought for the life of the nation.*

***Keywords: Pluralistic Democracy, Abdurrahman Wahid, Political Thought***

## Pendahuluan

Kajian pemikiran politik dalam khasanah ilmu politik, bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Cakupan kajian pemikiran politik tidak hanya terfokus pada konsep Negara, akan tetapi pada kajian lainnya seperti partai politik, kelompok penekan, pendapat umum, hubungan antar lembaga negara, kebijakan negara dan demokrasi.

Diterimanya demokrasi sebagai sistem terbaik dari sebuah negara dikarenakan demokrasi mampu untuk menyatukan kemajemukan seluruh golongan dan berprinsip agar seluruh rakyat di suatu negara dapat hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya diskriminasi ras, agama maupun golongan. Ketiadaan demokrasi dengan sendirinya merupakan ketidakadilan dalam soal hak dan kekuatan politik.<sup>1</sup>

Perkembangan praktik demokrasi di beberapa Negara menunjukkan bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat plural bisa berdiri jika ditopang oleh beberapa pilar. Pilar pertama adalah adanya konstitusi. Konstitusi Negara demokratis dicirikan dengan adanya pembagian kekuasaan di antara institusi- institusi pemerintahan, prinsip akuntabilitas yang mengontrol perimbangan kekuasaan, dan penerimaan/ pengakuan hak- hak warga Negara (hak sipil, politik, social, ekonomi, kultural). Sementara konstitusi dan hukum menjadi aturan- aturan formal warga Negara.

Pilar kedua adalah suatu kultur kewargaan yang dihidupi warga negara. Pilar ini perlu ditekankan secara khusus, karena dalam banyak kasus, proses demokratisasi tidak dapat berjalan berkelanjutan ketika tidak ditopang oleh kultur kewargaan. Dalam situasi itu, demokratisasi hanya menghasilkan

kelembagaan baru, namun tidak diikuti perubahan perilaku yang demokratis, bahkan dalam perjalanan selanjutnya dapat mendelegitimasi atau menghilangkan kepercayaan pada institusi demokrasi yang dibangun.<sup>2</sup>

Menurut Robert Dahl, Negara demokrasi yang maju adalah suatu Negara yang dinamikanya MDP (*Modern, Dynamic, Pluralist*). Menurut Dahl ada beberapa aspek yang menyebabkan demokrasi menguntungkan bagi suatu tatanan pemerintahan yaitu: pertama, menuntut adanya pembagian kekuasaan, pengaruh, wewenang, dan pengawasan sehingga tidak terpusat di suatu pusat dan terbagi pada bermacam-macam pribadi, kelompok, pekumpulan, dan organisasi. Kedua, masyarakat plural mengandalkan sikap dan kepercayaan yang menguntungkan gagasan-gagasan demokrasi. Meskipun demokrasi dan pluralistas merupakan konsep yang tumbuh secara mandiri, keduanya saling menguntungkan.

Lebih lanjut Robert Dahl menyatakan bahwa, sebuah negara disebut demokrasi pluralis, jika: negara tersebut merupakan demokrasi dalam arti poliarki dan organisasi-organisasi penting lainnya relatif bersifat otonom. Mengenai demokrasi yang diidentikkan dengan poliarki, Dahl menyatakan bahwa poliarki adalah sistem politik yang bercirikan suatu kompetisi yang bebas dan wajar di antara kelompok minoritas yang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan.<sup>3</sup>

Poliarki bukan hanya mencakup kebebasan memilih dan berkontestasi untuk jabatan publik tapi juga kebebasan berbicara dan mempublikasikan pandangan-pandangan yang berbeda, kebebasan membentuk dan bergabung

---

<sup>1</sup>Amarty Sen, *Demokrasi Bisa Memberantas Kemiskinan* (Bandung: Mizan, 2000)

<sup>2</sup> Zainal Abidin, *Pluralisme Kewargaan*. (Bandung: Mizan, 2011)

<sup>3</sup> Robert A Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992)

dengan organisasi dan akses terhadap sumber-sumber informasi alternatif.<sup>4</sup>

Demokrasi pluralistik menekankan pada upaya pencapaian kebaikan bersama dalam kehidupan politik. Dalam demokrasi pluralistik, dihadirkan konsensus dengan tujuan agar tidak tercipta konflik politik.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, ada konteks pluralitas yang tidak semestinya diabaikan, namun nyatanya luput diperhatikan dalam demokratisasi di Indonesia. Sebut saja pada praktik demokrasi di zaman Orde Baru yang ditandai dengan adanya dominasi Presiden. Tercipta pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, Presiden Soeharto menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia pada zaman Orde Baru.

Abdurrahman Wahid merupakan cendekiawan Indonesia yang secara tegas menerima demokrasi sebagai preferensi final bagi sebuah sistem politik atau kenegaraan.

Pemikiran dan pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi, hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang lain, sepenuhnya bersumber dari khazanah keilmuan pesantren.<sup>5</sup>

Visi pemikiran Abdurrahman Wahid dalam diskursus demokrasi Indonesia sangat terasa pengaruhnya, khususnya sejak awal 1990-an. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh dengan ciri pemikiran yang neo-modernis, dan terlihat pada sikapnya yang menerima dan menghormati pluralisme dan nilai-nilai demokratisasi termasuk hubungan agama dan negara. Selain itu, nilai-nilai pluralistik telah dirujuk ke dalam struktur iman (Islam) sebagai nilai inti Islam itu sendiri. Cita-cita demokratisasi, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan menjunjung tinggi nilai pluralistik merupakan ide-ide pemikiran

yang dapat diapresiasi dan digali dari pemikiran Abdurrahman Wahid.

Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa pluralitas yang tidak diiringi dengan keadilan sosial, baik secara ekonomi, politik, dan hukum akan sangat membahayakan integrasi bangsa, bahkan lebih jauh lagi telah mencederai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan sosial, kebebasan, diakuinya hak-hak individu, serta norma-norma sosial dan kearifan lokal bangsa Indonesia, terkadang telah diabaikan untuk mendapatkan jabatan tertentu, maupun keuntungan finansial.

Abdurrahman Wahid membumikan pemikirannya terkait demokrasi pluralistik melalui NU, Fordem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari Rahim NU.

Sosok Abdurrahman Wahid yang merupakan figur penting pada PKB, yang membesarkan PKB, yang mampu menata hubungan Islam dengan politik pada PKB, serta sosok yang mampu membawa NU menembus dan membebaskan batas-batas orientasi, visi, dan wawasan tradisionalisme NU untuk masuk ke wacana modern, liberal, dan cosmopolitan seraya tetap menjaga kelestarian tradisi klasik Islam, dan berpegang teguh pada upaya penegakkan demokrasi yang menghargai nilai-nilai pluralis membuat peneliti tertarik mengkaji **“Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Pluralistik dan Pengaruhnya di Indonesia.”**

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang peneliti uraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: **“Seperti apa pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi pluralistik dan pengaruhnya di Indonesia?”**.

---

<sup>4</sup> Penerapan Demokrasi Di Amerika Serikat (Demokrasi Liberal Yang Mengakui Pluralisme) Diakses di Laman

<https://lincemagriasti.wordpress.com/> Diunggah oleh *Lince Magriasti* Pada 11 Maret 2009

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 8

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang dan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi pluralistik.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi pluralistik di Indonesia

## Kerangka Teoritik

Dalam pandangan Dahl, Negara demokrasi yang maju adalah suatu Negara yang dinamakan MDP (modern, dynamic, pluralist). Menurut Dahl, dalam negara demokrasi yang pluralis harus ada pluralisme organisasi yaitu adanya pluralisme sebgaiian besar organisasi atau subsistem yang secara relative bersifat otonom di dalam wilayah sebuah negara. Pluralisme berpegangan bahwa demokrasi didalilkan pada keberagaman kepentingan dan penyebaran kekuasaan.<sup>6</sup>

Menurut Crowder dalam Handbook Teori Politik, untuk mewujudkan negara yang pluralis ketika pengambilan keputusan diperlukan:

- Toleransi keanekaragaman diakui secara lembaga.
- Kebebasan pilihan individu dilindungi, terutama karena relasi individu dengan sesamanya, dengan adanya pelimpahan tanggung jawab, harus dijadikan dasar untuk persetujuan bersama dan keuntungan timbal balik.
- Tiap-tiap individu punya kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan keindividualannya, kekhasan, dan ketidaktergantian dirinya diakui secara sosial.
- Tiap-tiap individu punya kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan otonominya sebagai agen moral.

## Metode Penelitian

---

<sup>6</sup> Dahl, Robert A, *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 8

## Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan model analisa deskriptif (descriptive reseach). Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variable, kelompok atau gejala social yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan setelah penulis melakukan penelitian eksploratif.

Penelitian ini juga disebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

## Pembahasan

Abdurrahman Wahid lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah atau 7 September 1940. Abdurrahman Wahid adalah putra dari Mantan Menteri Agama RI pertama K.H. Wahid Hasyim dan Ny. Hj. Sholehah.

Keterlibatan pertama Gus Dur dalam dunia politik dimulai ketika Pemilihan Umum legislatif 1982. Gus Dur menjadi juru kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU.

Pada tahun 1984 pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh tim *Ahl Hall wa al-'Aqli* yang diketuai oleh K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU.

Pada awalnya terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Umum dinilai positif oleh rezim soeharto. Bahkan Gus Dur dijadikan sebagai indoktrinator Pancasila pada tahun 1985. Pada tahun 1987, Gus Dur menunjukkan dukungan lebih terhadap rezim Soeharto dengan mengkritik PPP dalam Pemilu legislatif dan meperkuat Golkar. Bahkan, Gus Dur menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Hubungan Gus Dur

dan rezim Soeharto mulai merenggang sejak Gus Dur tak segan-segan mengkritik pemerintah terkait proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia. Hubungan keduanya mulai membaik ketika keduanya “berjabat tangan” dalam acara Musyawarah Kerja Nasional *Rabitah Ma’abid Islamiyah* 2 November 1996 di PP Zainal Hasan, Genggong, Probolinggo.<sup>7</sup>

Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari PDI. Pada Desember 1996, Gus Dur bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI untuk merencanakan penggulingan rezim Soeharto.<sup>8</sup>

Pada saat menjabat sebagai Ketum PBNU, Gus Dur dan PBNU mengeluarkan pandangan yang dikenal dengan “refleksi reformasi NU” pada 22 Oktober 1999. Selain pandangan tersebut, Abdurrahman Wahid yang aktif dalam kelompok Ciganjur, yaitu kelompok yang terdiri atas tokoh-tokoh nasional, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengeluarkan sebuah deklarasi monumental yang dikenal dengan “Deklarasi Ciganjur” yang berisi tentang tuntutan dikembalikannya kedaulatan rakyat, pengutuhan persatuan dan kesatuan, dan ditegakkannya demokrasi.

Ciri pemikiran Gus Dur yang neo-modernis terlihat pada sikapnya yang menerima dan menghormati pluralisme dan nilai-nilai demokratisasi termasuk hubungan agama dan negara. Selain itu, nilai-nilai pluralistik telah dirujuk ke dalam struktur iman (Islam) sebagai nilai inti Islam itu sendiri. Cita-cita demokratisasi, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan menjunjung tinggi nilai pluralistik merupakan ide-ide pemikiran Islam

Kontemporer yang dapat diapresiasi dan digali dari pemikiran Gus Dur.<sup>9</sup>

Menurut Gus Dur, ada tiga hal pokok demokrasi yaitu, kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Kebebasan adalah kebebasan individu sebagai warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Keadilan merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat untuk mengatur hidupnya sesuai kehendak masing-masing. Oleh karena setiap orang punya hak dan kesempatan untuk mengatur hidup dan kehidupannya sehingga harus diberi jalan yang mudah dan tidak dipersulit, seperti beberapa kasus yang terjadi pada saat Orde Baru. Pokok demokrasi yang ketiga adalah Syura atau musyawarah, artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur permusyawaratan. Gagasan demokratisasi Gus Dur telah dilempar ke publik jauh sebelum menjadi presiden RI.<sup>10</sup>

Citra Gus Dur sebagai cendekiawan muslim yang berwatak liberal, sekuler, berwawasan inklusif, dan selalu bersikap humanis, toleran terhadap kelompok minoritas serta menaruh perhatian pada kelompok yang tertindas, tetap saja melekat pada dirinya.

Menurut Gus Dur dalam konteks negara pluralistik seperti Indonesia, menjadikan agama apapun sebagai ideologi negara hanya akan memicu disintegrasi bangsa, karena menurutnya sangat tidak mungkin memberlakukan formalisme agama tertentu dalam komunitas agama masyarakat yang sangat beragam.

Berkaitan dengan ideologi Pancasila, Gus Dur juga menyatakan bahwa tanpa Pancasila negara Indonesia akan bubar, ideologi ini merupakan asas negara yang harus dimiliki dan diperjuangkan, tidak peduli apakah ia dikebiri angkatan

<sup>7</sup> Soebachman, Agustina, “7 Spirit Presiden RI” (Yogyakarta: Syura Media Utama, 2015), Hal.125

<sup>8</sup> Soebachman, Agustina, *ibid.* Hal.126

<sup>9</sup> Ma’mun Murod Brebesy. *Ibid.*

<sup>10</sup>Muh.Rusli, *Ibid*

bersenjata, dimanipulasi umat Islam, atau malah disalahgunakan oleh keduanya.

Menurut Gus Dur dalam masyarakat demokratis, semua warga negara kedudukannya sama di muka hukum, yang berperan adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan kekuasaan, kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya, dan adanya pemisahan yang tegas dalam fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Disebutkan pula bahwa pada sebuah negara yang demokratis adalah yang mampu menjamin hak-hak dasar manusia, yang meliputi, jaminan keselamatan fisik, jaminan keselamatan keyakinan agama, jaminan kehidupan keutuhan rumah tangga, jaminan keselamatan hak milik dan jaminan keselamatan akal.<sup>11</sup>

Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya, pertama, rasa tanggung jawab pada kepentingan bersama, kedua, kemampuan menilik masa depan, dan ketiga, kesediaan berkorban demi masa depan. Yang tak kalah pentingnya, masyarakat juga dituntut untuk siap berdemokrasi. Jadi, bukan sebatas institusinya saja, seperti adanya lembaga legislatif (DPR, MPR), dan partai politik. Hal terpenting menurut Abdurrahman Wahid yang populer disapa Gusdur ini, masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi.

Toleransi dan transparansi Gus Dur terhadap semua golongan menyebabkan bisa bergaul dengan semua kalangan, mulai kalangan nasionalis, tokoh agama, dan sosialis. Keyakinan agama Gus Dur yang kuat sehingga tak pernah khawatir dan curiga terhadap niat jelek kelompok lain. Gus Dur pada suatu kesempatan ketika menghadiri perayaan Natal di Balai Sidang Senayan mengatakan bahwa:

*“Saya adalah seorang yang meyakini kebenaran agama saya. Tetapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara dengan orang yang beragama lain di negeri*

*ini, bahkan dengan sesama Umat manusia. Sejak kecil itu saya rasakan, walaupun saya tinggal di lingkungan Pondok Pesantren, hidup di kalangan keluarga Kyai. Tetapi tidak pernah sedetik pun saya merasa berbeda dengan yang lain.”<sup>12</sup>*

Menurut Gus Dur yang didambakan rakyat Indonesia adalah hadirnya sebuah demokrasi, kebebasan dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mempedulikan perbedaan agama, adat-istiadat, pandangan hidup dan sebagainya.

Dalam salah satu wawancara dengan media, Abdurrahman Wahid menyatakan,

*“Demokrasi itu kebebasan, keadilan, serta persamaan di muka hukum. Demokrasi mesti berlandaskan kedaulatan hukum serta kesamaan tiap-tiap warga negara tanpa ada membedakan latar belakang ras, suku agama serta asal muasal, di muka undang-undang. Demokrasi tidak sekedar berhenti pada tataran prosedural belaka. Demokrasi mesti dapat mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat, terlebih mereka yang paling lemah, papa, miskin, serta tertindas. Pro-kontra merupakan esensi demokrasi. Bila anda melarang ada pro-kontra, anda calon diktator, bukanlah Pancasila. Perjuangan menegakan masyarakat pluralistik tanpa ada memakai kekerasan serta bertumpu pada ketabahan untuk menegakkan pandangan yang objektif serta dengan sendirinya pluralistik pada kebenaran yaitu satu-satunya jalan untuk menegakkan demokrasi. Serta, demokrasi itu bebas memiliki pendapat serta beda pendapat.*

<sup>11</sup> Dikutip dari M.Rusli, hal. 62

<sup>12</sup> Dikutip dari M.Rusli, hal. 64

*Serta dasarnya yaitu kejujuran serta keterbukaan.”<sup>13</sup>*

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, dalam dunia modern demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Dalam upaya mencapai kehidupan yang demokratis seluruh elemen masyarakat harus bertindak, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Pemerintah.<sup>14</sup>

Sepak terjang Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi dan pluralitas tidaklah mudah.

- **Pencabutan SIUPP Monitor 1990**

Dalam kasus pencabutan SIUPP Monitor 1990. Di kala hampir semua umat Islam mengecam, justru Gus Dur mengecam keras pembredelan Monitor. Pada saat orang ramai yang Gus Dur bukan tidak marah atas kasus “penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW”, namun karena membredel Monitor menurutnya bertentangan dengan demokrasi.

- **Menolak Bergabung dengan ICMI**

ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) merupakan organisasi cendekiawan muslim di Indonesia yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhoi Allah subhanahu wata'ala dengan meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan muslim se-Indonesia. ICMI dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim di Kota Malang tanggal 6-8

Desember 1990. Baharuddin Jusuf Habibie merupakan ketua ICMI yang pertama.<sup>15</sup>

Kelahiran ICMI menurut Gus Dur sarat akan nuansa sektarian. Nuansa itu menurutnya cukup mengganggu kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Respon atas penolakannya ditunjukkan dengan sikapnya yang menolak bergabung dengan ICMI dan mendirikan Forum Demokrasi.

- **Posko Pengaduan**

Pasca politik “sapu bersih” pemerintah dalam Peristiwa 27 Juli 1996. Suara-suara kritis yang tadinya begitu keras, hilang seketika. Politik kembali ke titik nol. Dalam peristiwa, yang berawal dari pendudukan kantor PDI dari kelompok Pro-Mega tersebut, banyak korban jiwa, luka-luka, bahkan ada yang hilang tak tentu rimbanya tak terhitung harta benda yang rusak dan terbakar. Tak ada suara protes atas sikap militer yang keras saat itu, bahkan sekadar untuk klarifikasi.

Dalam suasana yang mencekam, Gus Dur tampil dengan mendirikan “posko pengaduan” bagi mereka yang merasa kehilangan sanak keluarganya, mengalami kerugian fisik maupun harta benda. Gus Dur bersama dengan beberapa rekan aktivis hak asasi manusia, seperti “membebaskan masyarakat dari rasa takut” dengan membuat posko pengaduan bagi mereka yang merasa kehilangan keluarga dan mengalami kerugian fisik maupun harta benda. Gus Dur sendiri menjadi anggota relawan dari posko tersebut.<sup>16</sup>

- **Mendukung Penganut Kong Hu Cu**

Selama tahun 1990-an terjadi ketegangan di kalangan etnis Tionghoa. Banyak pihak yang melarang etnis tersebut merayakan perayaan mereka. Pada tahun 1996, terjadi perusakan dan pembakaran

<sup>13</sup> Dikutip dari laman <http://www.9mediaislam.com/2016/10/belajar-demokrasi-dari-gus-dur.html>, pada 22 Februari 2017

<sup>14</sup> Dialog Bersama Gusdur Tayang pada 23 Januari 2001 diakses melalui channel youtube: Kick Andy yang diakses pada 12 Maret 2017

<sup>15</sup> <http://www.icmi.or.id/>

<sup>16</sup> *Tabayun Gus Dur*, (LKIS)

rumah ibadah di Timtim, Surabaya, Bekasi, Situbondo dan lain-lain. Gus Dur berusaha membuat masyarakat menerima kalangan etnis namun membutuhkan waktu lama.

Kelompok ini sering dibela Gusdur, kendati negara tidak mengakui keberadaan negara ini khususnya pada masa Orde Baru, pembelaan dan pengakuannya terhadap hak minoritas ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial kebangsaan dan praktek demokrasi.

Peristiwa gugatan pasangan penganut Kong Hu Cu ke PTUN Surabaya, karena tidak diakuinya perkawinan mereka berdasar kepercayaan yang mereka anut menarik perhatian Gus Dur. Dalam sidang-sidang pengadilan tersebut, Gus Dur datang memberikan dukungan moral terhadap kedua pasangan tersebut. Kehadiran dan dukungan Gus Dur memang tidak berhasil memenangkan gugatan kedua pasangan itu, tetapi sekali lagi, Gus Dur dengan peristiwa itu menunjukkan perhatiannya terhadap kalangan minoritas, dan perlawanan terhadap gejala persekutuan segelintir kalangan dan negara untuk mendefinisikan, "yang berarti ingin menguasai, mengatur dan membatasi" ruang batin orang lain, menyangkut spiritualitas dan keyakinan.<sup>17</sup>

#### • Forum Demokrasi

Pada Maret 1991, unsur-unsur intelektual terkemuka membentuk kelompok prodemokrasi, Forum Demokrasi yang dipimpin oleh Gus Dur yang juga merupakan Ketum NU. Di belakang Gus Dur berdiri sekitar 45 intelektual terkemuka. Forum Demokrasi bukan merupakan kelompok aktivis.

Menurut Gus Dur, anggota-anggota Fordem ingin mendiskusikan dan merenungkan parameter-parameter demokrasi, batas-batas kekuasaan, dan bagaimana kita dapat memajukan proses demokratisasi dengan cara yang memuaskan. Meskipun forum ini tidak secara aktif menudkung pemogokan dan

pembelaan terhadap petani dalam sengketa tanah, Gus Dur menyatakan bahwa Fordem bekerja demi demokratisasi dengan mencoba memberikan kerangka kerja bagi petani, buruh, pedagang kecil, dan bahkan pegawai pemerintah untuk menyalurkan dan menata diri mereka sendiri.

Alasan Gus Dur mendirikan Fordem bersama agamawan-agamawan ialah baginya dorongan untuk memperjuangkan demokrasi dan persamaan merupakan bagian dari perintah agama. Perjuangan menegakkan demokrasi menjadi inti kehidupan Gus Dur. Termasuk menghargai setiap hak asasi warga negara.<sup>18</sup>

Fordem mendapat tekanan dari rezim. Selama kampanye pemilu Mei 1992, setiap upaya pertemuan Fordem dilarang. Fordem sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang menjadi sebuah organisasi yang lebih berorientasi masyarakat, organisasi berbasis massa, sehingga menjadi embrio oposisi di Indonesia. Tetapi setelah pemilu 1992 suara Fordem hilang dari permukaan.<sup>19</sup>

#### • Nahdlatul Ulama

Greg Borton menyebutkan bahwa semenjak menjadi Ketua Umum PBNU pada 1984, retorika Gus Dur tampak semakin bebas dan progresif. Yang tergambar dari berbagai gagasannya, seperti pribumisasi Islam, rukun tetangga, serta gagasan bahwa non-muslim juga boleh menjadi presiden Indonesia yang merupakan konsekuensi dari praktek demokrasi dan upaya menghargai pluralitas di Indonesia.<sup>20</sup>

Sejak terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada 1989, sikap Gus Dur semakin kritis. NU di bawah kepemimpinan Gus Dur menjadi ormas yang sering mengkritik, mendorong, dan berbagai tindakan menolak kebijakan rezim Orba.

<sup>17</sup> -, *Tabayun Gus Dur*. (LKis), hal. 7

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 24

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 175

<sup>20</sup> Ma'mun, *Ibid.*, hal. 108

NU menjadi ormas terbesar di era Orba, yang menimbulkan keresahan di kubu penguasa, sehingga penguasa melakukan intervensi dengan menempatkan Cholid Mawardi sebagai Ketua Umum dan Slamet Effendy Yusuf sebagai Sekjen PBNU.<sup>21</sup>

Pada tahun 1998 pasca reformasi, Gus Dur yang saat itu masih aktif menjabat ketua umum PBNU. Dalam merespon proses reformasi yang sedang bergulir, PBNU menyampaikan beberapa pandangan:

Pertama, sebagai bagian dari bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, menghormati martabat kemanusiaan serta mendambakan tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, segenap elemen memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga agar reformasi berjalan ke arah yang lebih tepat.

Kedua, rekonsiliasi nasional, rembuk nasional, silaturahmi nasional atau apapun istilah yang digunakan jika dilaksanakan harus ditujukan untuk merajut kembali persaudaraan kebangsaan dirancang ke arah penataan sistem kebangsaan dan kenegaraan yang lebih demokratis, jujur dan berkeadilan.

Ketiga, agenda-agenda politik bangsa yang diajukan oleh kalangan pro reformasi dan masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya tetap menjadi agenda bersama yang harus dilaksanakan agar reformasi tidak berhenti di tengah jalan, sehingga dapat menjangkau terbentuknya tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, penyampaian berbagai gagasan yang dikemukakan untuk menjadi wahana publik seperti pendapat tentang Negara federasi, pendapat tentang nasib suatu daerah yang sepenuhnya diserahkan kepada penduduk setempat melalui referendum dan sejenisnya, hendaknya dilakukan dengan hati-hati, penuh kearifan dan didasari komitmen bersama, serta

dihindari adanya pemaksaan kehendak. Kecerobohan dalam hal ini, hanya akan melahirkan perpecahan dan disintergrasi yang akan merugikan kita semua sebagai warga bangsa.

Kelima, kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus disikapi secara arif dan bertanggung jawab. Pengungkapan kasus-kasus tersebut harus dilakukan melalui jalur hukum sebagai bagian dari demokrasi, jujur, dan bertanggung jawab.

Keenam, TNI hendaknya segera mewujudkan gagasan redefinisi, reaktualisasi, dan refungsionalisasi konsep dwifungsi yang dijalankan selama Orde Baru.

Ketujuh, Kejaksaan Agung beserta jajarannya harus segera melakukan langkah-langkah yang serius untuk memberantas KKN yang hanya tidak ditunjukkan kepada kelompok tertentu tetapi juga diberlakukan kepada mantan pejabat maupun pejabat pemerintah yang sedang berkuasa dari pusat hingga daerah.

Kedelapan, monopoli harus segera dibasmi tuntas dalam setiap praktik ekonomi.<sup>22</sup>

- **Partai Kebangkitan Bangsa**

PKB bisa dikatakan sebagai penjelmaan Partai NU yang di tahun 1970-an difusikan dengan tiga partai Islam lainnya (MI, Parmusi, Perti) menjadi PPP. Misi PKB adalah menegakkan komitmen bangsa yang demokratis.

Ketika Abdurrahman Wahid secara resmi baik politik maupun hukum menjadi Ketua Dewan Syuro PKB, hampir seluruh gerakan PKB mulai dari perencanaan dan memperkokoh ideologi PKB sampai pelaksanaan mempengaruhi konstituen, Abdurrahman Wahid mempunyai pengaruh yang sangat kuat.

Gus Dur juga merupakan ideolog PKB. Gus Dur merupakan figur penting pada PKB, karena dengan perangkat ketokohan intelektualitas dan reputasi baik

<sup>21</sup> Ma'mun, *Ibid*, hal.94-95

<sup>22</sup> Bahrul 'Ulum, "Bodohnya NU apa NU dibodohi?" (Jawa Tengah: Ar-Ruzz Press, 2002), Hal. 129

yang dimiliki Gus Dur, ia mampu membesarkan PKB, yang mampu menata hubungan Islam dengan politik pada PKB. Tanpa Gus Dur, PKB rasanya sulit untuk tumbuh dan berkembang.

Visi dan kebijakan-kebijakan politik PKB akan selalu dibawah bayangan Gus Dur, karena Gus Dur yang mengarahkan dan bahkan menentukan keputusan-keputusan politik yang telah dan akan diambil oleh PKB. Selain sebagai pengayom dan pemberi restu bagi berdirinya PKB, Gus Dur secara intelektual memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengarahkan kebijakan atau keputusan-keputusan politik yang harus diambil oleh PKB.

Gus Dur juga merupakan seseorang yang diakui sebagai pembela kebebasan dan HAM yang memiliki reputasi bagus di tingkat nasional dan internasional. Tentu saja ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi PKB. Karena itu pengaruh Gus Dur dalam PKB sangat dominan. Maka ideologi Gus Dur akan selalu menjadi pola anutan dan acuan PKB dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan politiknya.

Gus Dur juga merupakan seseorang yang diakui sebagai pembela kebebasan, demokrasi dan HAM yang memiliki reputasi bagus di tingkat nasional dan internasional. Tentu saja ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi PKB. Karena itu pengaruh Gus Dur dalam PKB sangat dominan. Maka ideologi Gus Dur akan selalu menjadi pola anutan dan acuan PKB dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan politiknya. dalam konteks PKB Gus Dur juga selalu mengedepankan toleransi, inklusif dan menjunjung tinggi pada aspek humanisme, hingga dengan demikian gerakan Gus Dur didalam PKB secara nasional tidak meletakkan Islam struktural tetapi

mendekati Islam substansial dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat.<sup>23</sup>

Identitas nasionalis-religius yang disandang PKB pada dasarnya merupakan kristalisasi dari gagasan, sejarah, dan tradisi Islam Indonesia yang terbuka dan dialogis. Posisi ideology dengan perspektif teologi yang kental itu selaras dengan gagasan cerdas nan agung *founding father* Indonesia yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pilihan yang disokong penuh oleh ulama-ulama *ahlusunnah wal jama'ah* itu sangat relevan dengan realitas kebangsaan Indonesia yang majemuk dan berbudaya.

Dalam AD PKB disebutkan bahwa tujuan PKB adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir batin, material spiritual, dan mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, bersih dan terbuka, bersih dan ber-*akhlaqul karimah*.

Menempatkan kepentingan bersama (nasional) di atas kepentingan sebagian atau parsial secara pasti merupakan perjuangan yang dilandasi semangat keberagaman yang tinggi. Gerakan politik PKB sama sekali tidak mengenyampingkan agama, melainkan justru meluhurkannya. Muara dari semua gerakan politik PKB ialah mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, demokratik, dan berbilang budaya atau multicultural, dimana Islam menjadi landasan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai wadah penyaluran aspirasi politik kaum Nahdliyin khususnya, PKB memiliki cita-cita yang bersumber dari landasan politik NU. Cita-cita politik yang dimaksud adalah terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, merdeka, dan berdaulat, yang terjamin hak-hak dasarnya, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan keselamatan dari

---

<sup>23</sup> Risna Alvia. 2015. "Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Setelah Era Reformasi 1998-2009". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

pemaksaan agama, perusakan keturunan serta kebebasan harta benda secara sah.<sup>24</sup>

Cita-cita yang demikian itu akan dapat dicapai oleh PKB melalui keterlibatan dalam penetapan kebijakan publik, yakni melalui jalur kekuasaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan tentang pemberdayaan masyarakat lemah dan terpinggirkan, perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas, serta penegakan sistem ekonomi, politik dan budaya yang berlandaskan kedaulatan rakyat.

Gus Dur menyatakan bahwa PKB menjadikan dirinya sebagai partai terbuka atau partai yang bersifat nasionalis. PKB terbuka untuk siapa saja, untuk seluruh komponen bangsa Indonesia. PKB bertekad akan melibatkan semua komponen bangsa yang ada di negara Indonesia.<sup>25</sup>

Pemikiran Gus Dur tentang demokrasi pluralistik juga berpengaruh dalam platform PKB (*Mabda' Siyasiy*) PKB.

Gus Dur memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi PKB. Dalam konteks PKB, Gus Dur selalu mengedepankan toleransi, inklusif, dan menjunjung tinggi pada aspek humanism, hingga dengan demikian gerakan Gus Dur di dalam PKB secara nasional tidak meletakkan Islam structural tetapi mendekati Islam subtansional dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat.<sup>26</sup>

Nurcholish Madjid menilai bahwa kehadiran PKB dalam percaturan politik nasional tidak lagi menunjukkan diri sebagai partai politik yang mengedepankan politik aliran. PKB bersifat terbuka dan tidak sectarian, mengingat bangsa Indonesia yang pluralis, maka PKB tidak identik dengan NU.

Komitmen PKB menjadi partai yang terbuka membuktikan bahwa PKB bukan partai aliran meski didirikan oleh pemimpin elit NU. Sehingga hubungan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dengan PKB tetap ada jarak, sama dengan partai politik lainnya.

PKB mencantumkan perjuangan menegakkan hak asasi manusia, keadilan serta demokrasi.

PKB tetap memperjuangkan tegaknya ajaran Islam, tetapi tidak melalui pelaksanaan hukum Islam dalam sebuah negara. Artinya, menurut Gus Dur, PKB memperjuangkan tegaknya ajaran Islam melalui pendidikan dan dakwah, melalui penegakkan moralitas atau akhlak bangsa.<sup>27</sup>

PKB berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terbuka untuk siapa saja, untuk seluruh komponen bangsa. PKB bertekad akan membentuk pemerintahan dengan melibatkan semua komponen bangsa yang ada di negara ini.

Ketika proses pemilihan presiden RI di MPR tahun 1999, poros tengah yang digalang oleh lokomotif reformasi Amien Rais, menggiring beberapa partai untuk menggolkan Gus Dur menjadi presiden, dan berhasil mendudukan Gus Dur sebagai presiden pertama dalam masa reformasi mengalahkan Megawati dalam Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999.

Keran demokratisasi yang dibuka lebar-lebar sejak awal 1999 dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk mendirikan partai politik dan mengikuti pemilu, tak terkecuali PKB yang ikut serta dalam pemilu 1999.

#### • Kebijakan Selama Menjadi Presiden

Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk Gus Dur memiliki komposisi yang

<sup>24</sup> Asmawi, "PKB Jendela Politik Gus Dur", (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), hal. 55

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, "Membangun Demokrasi", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 14

<sup>26</sup> Alvia, Risna. Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pengaruhnya Terhadap

Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Setelah Era Reformasi 1998-2009. UIN Syarif Hidaytullah Jakarta

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 39

beragam, terdiri atas wakil partai-partai, elemen teknokrat, militer, utusan daerah, dan kelompok fungsional.

Pembelaan terhadap minoritas juga dilakukan Gus Dur dengan mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama yang Sah dan Agama Terlarang.

Ada beberapa perundang-undangan di Indonesia yang lahir pada masa Pemerintahan Gus Dur, yang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia dan menghukum pelanggar hak asasi manusia sebenarnya mendekati lengkap. Selain hukum pidana yang telah ada, pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 sejak September 1999, dan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 sejak November 2000. Ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia juga ditetapkan di dalam amandemen UUD 1945 yang dihasilkan oleh Sidang Tahunan MPR tahun 2000.

### **Kesimpulan**

Abdurrahman Wahid merupakan tokoh intelektual Indonesia yang secara tegas menerima demokrasi sebagai preferensi final bagi sebuah sistem politik atau kenegaraan. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa negara demokrasi harus menjunjung pluralitas, keadilan sosial, penegakkan hukum. Apalagi Indonesia yang memiliki beranekaragam suku bangsa.

### **Saran**

Hasil penelitian ini pada akhirnya melahirkan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang tertarik pada kajian yang sama. Pertama, Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan sosok pejuang demokrasi dan pluralisme yang patut ditiru langkah-langkahnya dalam memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan persamaan di muka hukum. Kedua, demokrasi pluralistik merupakan sistem yang baik dan layak untuk diterapkan di

Indonesia mengingat keanekaragaman bangsanya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Abidin, Zainal. 2011. *Pluralisme Kewargaan*. Bandung: Mizan
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod. 1999. *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur Dan Amin Rais Tentang Negara*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anderson, Benedict, dkk. 1999. *Mencari Demokrasi*. Midas Surya Grafindo
- Asmawi. 1999. *PKB Jendela Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Barton, Greg. 2017. *Biografi Gus Dur*. Jakarta: Mahabbah
- Batubara, Palar. 2009. *Bongkar Pasang Konstruksi Politik Indonesia A la 6 Presiden*. Gratama Manangka
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Prima Grafika: Jakarta
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali
- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Efriza. 2015. *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Setara Press
- Eko, Sutoro. 2003. *Transisi Demokrasi Indonesia Runtuhnya Rezim Orde Baru*. Yogyakarta: APMD Press
- Fatah, Eep Saefulloh. 2000. *Pengkhianatan Demokrasi A La Orde Baru Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Gaus, Gerald F, Chandran Kukathas. 2004. *Handbook Teori Politik*. Bandung: Nusa Media
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2010. *Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Iqbal, Muhammad. Nasution, 2015. Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam Dari*

- Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Irawan, Bambang. 2000. *Supremasi Sipil? Agenda Politik Militer Gusdur*. Yogyakarta: Tarawang Press
- Ismulyadi. Kamar, Samsul. Dkk. 2000. *Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Forum Komunikasi Keluarga
- Lalobo, Muhadam, Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada
- Marijan, Kacung. 2010. *SPI Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Masoed, Mohtar. 2000. *Supremasi Sipil? Agenda Politik Militer Gus Dur*. Yogyakarta: Elstreba
- Mufti, Muslim. 2013. *Kekuatan Politik di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Oemar, Nadjmuddin, dkk. 2001. *Demokrasi, Kekerasan Disintegrasi*. Jakarta: Kompas
- Pambudi, Himawan S, Siti Fikriyah. 2003. *Menuju Demokrasi Terkonsolidasi*. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja
- Parera, Frans M, T. Jakob Koekerits. 2001. *Demokratisasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa*. Jakarta: Kompas
- Priyono, B. Herry, dkk. 2012. *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- Rasyid, Muhammad Ryaas, dkk. 2007. *Transformasi Nasionalisme dan Demokrasi di Era Reformasi*. Pekanbaru: KPU-UNRI Press
- Rauf, Maswadi, dkk. 2007. *Pemantapan NKRI dalam Masyarakat Plural*. Pekanbaru: Unri Press
- Ruhpina, Said. 2005. *Menuju Demokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Nuansa Aksara
- Sen, Amartya. 2000. *Demokrasi Bisa Memberantas Kemiskinan*. Bandung: Mizan
- Shofan, Moh, dkk. 2008. *Menegakkan Pluralisme*. Yogyakarta: LSAF
- Slamet, Ina E. 2005. *Yang Berkuasa, Yang Tersisih, Yang Tak Berdaya: Demokratisasi yang Bagaimana di Indonesia?*. Bandung: Yayasan Akatiga
- Soebachman, Agustina. 2015. *Pasang Surut NKRI dari Pak Karno Hingga Pak Jokowi*. Yogyakarta: Syura Media Utama
- Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahn Demokratis (1996-2001)*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sundari, E, Endang Sumiarni. 2010. *Hukum yang Netral bagi Masyarakat Plural*. Bandung: Karya Putra Darwati
- Suseno, Franz Magnis. 2015. *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme*. Jakarta: Gramedia
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Unde, Andi Alimuddin. 2014. *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*. Jakarta: Prenada
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Islam, Negara, dan Demokrasi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: Wahid Institute
- Wahid, Abdurrahman. 2000. *Membangun Demokrasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Jurnal :**
- Abdullah, Taufik. 2010. *Refleksi Selintas Tentang Primordialisme, Pluralisme, Dan Demokrasi Analisis Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 12 No. 2 Tahun 2010.

- Badarussyamsi. 2014. *Khazanah Visi Politik Muslim Indonesia*. Fakultas Ushuluddin IAIN STS: Jambi. TAJDID Vol. XIII, No. 2, Juli-Desember 2014
- Badu, Muhammad Nasir. 2015. *Demokrasi dan Amerika Serikat Democracy and the United States of America*. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015
- Fikri, Hamdani Khaerul. 2015. *Konsep Pendidikan Multikultural (Eksistensi Dan Nilai-Nilai Urgensinya Di Indonesia)*. Volume VIII Nomor 1 Januari-Juni 2015 Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Vol. 16 No. 2 Juli-Desember 2015
- Nugroho, Anjar. Darodjat. Yuspy G, Lendra. *Islam Dan Demokrasi (Studi Pemikiran Amien Rais Dan Abdurrahman Wahid)*
- Rusli, Muh. *Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur*. Farabi ISSN 1907- 0993 E ISSN 2442-8264 Volume 12 Nomor 1 Juni 2015 Halaman 50-71 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo
- Salleh, Kamarudin. Khoiruddin Bin Muhammad Yusuf. 2014. *Gus Dur Dan Pemikiran Liberalisme*. Ar - Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014. Malaysia: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan
- Santalia, Indo. 2015. *K.H. Abdurrahman Wahid: Agama Dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, Dan Pribumisasi*. Jurnal Al-Adyaan, Volume I, Nomor 2
- Saoki. *Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014; ISSN 2089-0109 Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
- Subaidi. 2014. *Politik Kultural Kh. Abdurrahman Wahid Dalam Demokratisasi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 48, No. 1, Juni 2014
- Ubaidillah, Achmad. *Muslim Humoris Pejuang Demokrasi*. Pusat Studi Pesantren: Bogor

#### **Internet**

- <http://kbbi.web.id/plural>
- <http://santrigusdur.com/2014/05/persaudaraan-dan-pluralitas/>
- <https://lincemagriasti.wordpress.com/://www.9mediaislam.com/2016/10/belajar-demokrasi-dari-gus-dur.html>,
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>